Gubernur Arinal Ajak Legislatif Ciptakan Pemilu Aman, Damai Dan Berkualitas :

Sumber Dokumentasi : Sekretariat DPRD Provinsi Lampung 02/01/2024.

Gubernur Arinal Ajak Legislatif Ciptakan Pemilu Aman, Damai Dan Berkualitas, sebagai tugas dan Fungsi yang bersinergi antara Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan Legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, dan berkualitas. Kerja sama yang baik diperlukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, memberikan edukasi politik, serta mengupayakan pemilu yang bersih dan jujur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menghadiri acara ramah tamah bersama DPRD Provinsi Lampung dalam rangka menyongsong Pemilu Tahun 2024, di Singa Laut Cottage Pantai

Mutun Kabupaten Pesawaran, Kamis (28/12/2023). "Saya yakin, dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan Pemilu yang adil dan transparan.

Gubernur berharap agar anggota dewan ikut menjaga kondusivitas di wilayah daerah pemilihannya (dapil) masing-masing untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga. "Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi Bapak Ibu Pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal mengapresiasi acara ramah tamah antara Gubernur Lampung dan Anggota DPRD Provinsi Lampung ini sebagai salah satu sarana untuk menjalin silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan. "Acara ini sebagai

momentum bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda dalam hal warna, namun memiliki pemikiran dan keinginan yang sama untuk mewujudkan Lampung Berjaya.

Hadir dalam acara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Bupati Kabupaten Pesawaran dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada kesempatan ini Gubernur menyampaikan terima kasih dan mengungkapkan rasa senangnya dapat menghadiri undangan bersama Pimpinan DPRD Provinsi Lampung, Kegiatan ini menjadi sarana yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif, demi kemajuan bersama dan kesejahteraan rakyat Lampung, serta Provinsi Lampung adalah salah satu wilayah yang sangat strategis di Indonesia yang merupakan Entrance (Pintu Masuk) pulau sumatera sebagai akses penghubung dan jalur ekonomi nasional.

Gubernur Arinal menerangkan Lampung memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda suku, bahasa daerah, adat, tradisi dan agama."Hal Ini akan menjadi sebuah kekuatan dan akan menjadi sebuah potensi apabila kita bersatu," ujarnya.

Rahmat Mirzani Djausal Menegaskan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Merupakan Langkah Awal Dalam Pendidikan Moral Pancasila Dimasa Sekarang Perlu Ditanamkan Didalam Sanubari Segenap Anak Bangsa Khususnya di Wilayah Provinsi Lampung :

Sumber Dokumentasi : Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Januari 2024.

Anggota DPRD Provinsi Lampung selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerinda Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerangkan bahwa Pemuda Pemudi adalah kekuatan yang penting dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat ini.

Sementara generasi tua harus menjadi pendorong bagi Pemuda, Pemuda dan Pemudi adalah anak panah yang melesat ke depan. Sementara generas tua akan “fade away” atau menghilang.

Sumber Dokumentasi : Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Januari 2024.

Rahmat Mirzani Djausal menekankan, pendidikan adalah kunci paling ampuh untuk mengubah banyak hal dan akan menjadi kemampuan pemuda dalam menyaring informasi apa saja yang mereka terima dan kritis lebih diutamakan bagi pemuda dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat ini, misalnya isu toleransi. “Semua informasi yang diterima dari sosial media, harus disaring, difilter, mana yang logis dan tidak.

Sumber Dokumentasi : Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Januari 2024.

Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada anak milenial dengan Pancasila yaitu dengan cara berinteraksi dengan mereka melalui daring dan mempertemukan anak milenial dari seluruh Indonesia. Dalam sehari, generasi pemuda bisa mengakses internet 8 sampai 13 jam. Untuk itu penggunaan sosial media sebagai alat sosialisasi Pancasila yang efektif sudah mulai perlu dilakukan, Karena anak milenial umumnya dekat dengan dunia digital maka, pendekatannya pun melalui era digital.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerinda Provinsi Lampung dan Anggota DPRD Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami

dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia khusus di wilayah Provinsi Lampung. Generasi milenial menjadi obyek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai faham yang bisa memecah kedaulatan bangsa.

Sumber Dokumentasi : Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Januari 2024.

Penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi, kohesif, dan punya literasi keagamaan yang baik dan juga Pancasila akan menjadi jati diri generasi milenial. Namun, ada strategi khusus dalam menanamkan nilai Pancasila pada generasi muda.

Sumber Dokumentasi : Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Januari 2024.

Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan pengamalan tidak boleh dilakukan dengan metode indoktrinasi seharusnya Fleksibilitas yang harus dilakukan dan menegaskan ada perbedaan strategi penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial. Metode doktrin dipandang sudah tidak relevan dengan sikap dan pola pikir generasi milenial. “Kedepankan budaya mendengar ketimbang menggurui. Dengar apa yang anak milenial inginkan tentang Pancasila. Generasi masa depan atau yang sering kita sebut dengan istilah “anak” atau “keturunan” dalam ajaran Islam mendapat perhatian penting, baik melalui ayat Allah maupun keterangan lisan (*qaul*) maupun tindakan (*fi`il*) dari Rasulullah saw. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahwa manusia secara menyeluruh mendapat amanah untuk menjadi penanggung jawab bumi (khalifah) dari generasi ke generasi.

Rakor KPU Provinsi lampung Uji Publik Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi Lampung :

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Lampung yang di gelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Sheraton, Kamis (19/01/2023). Gubernur Arinal Djunaidi mengapresiasi KPU Lampung atas diselenggarakannya kegiatan ini sebagai wahana dalam penyebaran informasi terkait rancangan

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Menurut Gubernur, Pemilihan Umum bukan hanya semata-mata tugas KPU dan Komisioner, tapi juga tugas bersama-sama dari setiap daerah pemilihan. Hal tersebut sangat penting sebagai arena kompetisi dan konsistensi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dapil dan alokasi kursi juga sangat menentukan derajat keterwakilan politik pada penyelenggaraan pemilu. Penataan Dapil dan kursi harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek pemerataan dan kegiatan pembangunan ke seluruh wilayah.

Lebih jauh terkait dengan penataan daerah pilihan (Dapil). Dapil anggota DPRD Provinsi Lampung adalah kecamatan dan gabungan kecamatan atau bagian dari kecamatan, dimana alokasi kursi setiap dapil paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi.Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi, dan paling banyak 55 kursi, dengan tetap memperhatikan prinsip penataan dapil.Sementara itu, menurut Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami menyampaikan bahwa Uji Publik dilakukan setelah keluarnya surat KPU RI

bernomor 51/PL.01.3-SD/05/2023 pada 13 Januari 2023, tentang Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Dapil DPRD Provinsi.

Surat tersebut menidaklanjuti putusan Mahkamah Konstitutsi (MK) No. 80/PUU-XX/2022, yang memberikan kewenangan terhadap KPU (RI) untuk mengatur dapil anggoa DPR (RI) dan DPRD Provinsi.Sedangkan untuk penataan dapil yang digunakan mengacu pada pasal 188 ayat (2)UU no 7 tahun 2017 dan Daftar Agregat Kependudukan (DAK) Semester I tahun 2023.

Selain Gubernur Lampung kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Lampung, Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Ketua dan perwakilan Partai Politik di Provinsi Lampung, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Akademisi, serta tokoh masyarakat. Selanjutnya, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota juga sudah mengumumkan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan atau calon independen di pilkada serentak. Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan dimulai sejak 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024.Ditempat yang sama Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Suheri menjelaskan Pilkada sudah akan mulai tahapannya. Karena itu, pengawas pemilu sudah harus mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai mitigasi persiapan Pilkada 2024.“Mitigasi yang sudah berjalan dalam waktu dekat ini, yakni memastikan pengawasan Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU dilakukan sesuai dengan prosedur,” Jelas Suheri

Terkait imbauan Bawaslu terkait larangan mutasi pejabat oleh Kemendagri jelang Pilkada, dan Bawaslu telah mengirim surat kepada Pemda yang bertujuan untuk tidak melakukan segala hal yang berkaitan mutasi jabatan.

Berdasarkan aturan yang termaktub dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yang yang menyebutkan tahapan penetapan paslon pilkada jatuh pada 22 Maret. Bawaslu mengimbau Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan pergantian penjabat daerah di setiap tingkatkan.